

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Randhi¹, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Politeknik STIA LAN Jakarta, email: randhipardede@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Politeknik STIA LAN Jakarta, email, email: luki@stialan.ac.id

* Corresponding Author: Randhi

| Recieved: 15-06-2024

| Revised: 16-06-2024

|| Accepted: 17-06-2024

Abstrak:

Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tujuan – Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Design/metodologi/pendekatan – Penulisan artikel ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan melakukan kajian pustaka (*library research*). Dalam proses penulisan artikel ilmiah ini, teori serta hubungan atau dampak antar variabel dianalisis melalui berbagai sumber informasi antara lain buku, jurnal dan tesis, yang diakses baik secara fisik di perpustakaan maupun melalui internet.

Hasil – Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Disamping itu, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin tinggi tindak lanjut hasil pemeriksaan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Keterbatasan/implikasi penelitian – Keterbatasan penulisan artikel ini hanya menggunakan analisis literatur dan kajian pustaka yang belum mencakup penelitian eksperimental atau studi empiris yang lebih mendalam.

Keywords: (*government accounting standards, government internal control system, and follow up on audit results, literature review*).



Introduction

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dalam beberapa tahun kebelakang yang ditandai dengan bergesernya sistem pemerintahan yang sentralistik beralih ke arah sistem pemerintah desentralistik berdampak pada munculnya tuntutan dan harapan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai wujud kewajiban dalam mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik merupakan makna dari akuntabilitas (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tujuan yang mendasar dalam upaya reformasi akuntansi dan administrasi pada sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian pada suatu negara, yaitu dengan adanya akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan yang dapat dipercaya serta bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan dan memastikan terlaksananya roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun, menyajikan, dan mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Informasi dalam laporan keuangan yang disusun, disajikan, dan dipublikasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami dan dapat digunakan oleh pemakai serta informasi yang ada didalamnya dapat dipercaya.

Berbagai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pengguna yang mencakup berbagai aspek diantaranya harus memiliki nilai atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai serta informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat dipercaya (Rahmawati, Mustika dan Eka, 2018).

Pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas akan terwujud apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memenuhi syarat karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Beberapa karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan pemerintah yang dipersyaratkan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya laporan keuangan dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan relevan, laporan keuangan dapat dibandingkan dan seluruh informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pemakai.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintah merupakan sekumpulan prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, oleh karena itu standar akuntansi pemerintah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dalam upaya menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan andal hanya mampu dicapai apabila proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Menurut Rahmawati, Mustika dan Eka (2018), pengendalian internal dapat diartikan sebagai tindakan suatu organisasi dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan pengukuran sumber daya, disamping itu sistem pengendalian internal berperan penting dalam mencegah dan melakukan deteksi awal terhadap tindakan penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya yang dimiliki organisasi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan merupakan suatu hal yang sangat terkait dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemeriksaan oleh auditor yang bertujuan untuk mengawasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh instansi yang menjadi objek pemeriksaan sebagai upaya perbaikan guna menghindari kesalahan yang berulang sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui adanya rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ilmiah ini, yaitu sejauh mana pengaruh faktor standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam suatu *literature review* dalam bidang Manajemen Keuangan Negara.

Literature Review

Reformasi keuangan pemerintah yang dimulai sejak awal tahun 2000 telah berdampak pada meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat akan hadirnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap unit kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas itu sendiri dapat dikatakan sangat baik apabila mampu memberikan informasi-informasi yang mudah untuk dipahami serta dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan, mudah dipahami dan tidak menyesatkan, serta dapat diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah dituntut untuk dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan kepada pihak eksternal diantaranya laporan keuangan formal seperti laporan defisit dan surplus, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan arus kas, dan neraca serta capaian kinerja yang disampaikan dalam bentuk ukuran finansial dan non finansial. Sebuah laporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan yang merupakan media informasi keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksternal.

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit kinerja dan audit keuangan setiap tahunnya. Bentuk hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi beberapa karakteristik diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (PP No. 71, 2010), sehingga diharapkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunaannya. Penyajian laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan dan tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus para penggunaannya. Disamping penyajian dan penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, setiap entitas pelaporan dimungkinkan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Kualitas suatu laporan keuangan dapat ditentukan dari informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat memenuhi kualitas yang tercermin dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut pendapat yang disampaikan Sugiri dan Bogat (2018) menyatakan terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Menurut Hery (2016) menyatakan ada tambahan 1 karakteristik lagi secara tersendiri, yaitu konsistensi sehingga terdapat 5 karakteristik kualitatif informasi akuntansi meliputi informasi yang dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan konsistensi.

Suatu laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik apabila mampu memberikan informasi-informasi yang mudah dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan penggunaannya dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan, bebas dari hal-hal yang menyesatkan, terjadinya kesalahan-kesalahan yang material serta mampu diandalkan, maka laporan keuangan ini dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut Hussey (1999) dalam Rasyid (2019) standar akuntansi merupakan sekumpulan peraturan dan prosedur yang ditetapkan berhubungan dengan pengukuran, penilaian dan pengungkapan atas transaksi akuntansi. Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan transaksi-transaksi apa saja yang harus dicatat dan kapan harus dicatatnya (saat pengakuan), kemudian dengan nilai berapa dicatatnya (pengukuran) dan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan (pengungkapan).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur terkait perlakuan akuntansi dalam penyusunan suatu laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga sejalan dengan karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Singkali dan Widuri (2014) dalam Cris Kuntadi *et al.* (2022) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pemahaman yang baik dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat diperlukan oleh setiap aparatur pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan perlu dipahami berbagai dasar pemikiran yang penting antara lain terkait basis akuntansi yang digunakan dan hubungan antara sistem dan standar dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dalam memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penentu terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan.

Sistem pengendalian internal terdiri atas lingkungan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dalam menjaga sumber daya suatu organisasi, memeriksa terhadap ketelitian dan keandalan suatu data akuntansi, mendorong upaya efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kesalahan (*error*) dan melakukan pendeteksian dini terhadap potensi penggelapan (*fraud*).

Menurut Mokoginta *et al.*, (2017) pengendalian internal merupakan suatu metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dilaksanakan dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dimana menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan instansinya masing-masing.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)* (2017) dalam Ompusunggu (2020) komponen-komponen sistem pengendalian internal meliputi: 1. *Control environment* (lingkungan pengendalian) ; 2. *Risk assessment* (penilaian risiko); 3. *Control activities* (kegiatan pengendalian); 4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi); dan 5. *Monitoring* (pemantauan)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu: 1. Pengendalian lingkungan; 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian; 4. Informasi dan komunikasi; 5. Pemantauan pengendalian internal

Sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif mampu melindungi suatu organisasi dari kesalahan-kesalahan manusia, mengurangi dan mencegah kekeliruan serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga informasi-informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan publik.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan entitas unit kerja atau organisasi yang diperiksa oleh pihak lain yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan oleh auditor pada umumnya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem tata kelola pada pemerintah dan organisasi. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan selama masa pemeriksaan dan rekomendasi tersebut disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan masing-masing instansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 rekomendasi didefinisikan sebagai saran pemeriksa dari hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada pihak berwenang agar dilakukan tindakan korektif sehingga secara teknis, rekomendasi yang diterima oleh instansi wajib untuk ditindaklanjuti. Laporan hasil pemeriksaan juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit oleh BPK.

Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh instansi atas temuan-temuan audit pada periode-periode sebelumnya. Hasil pemantauan tersebut akan memberikan gambaran seberapa jauh rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh instansi.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan dirancang untuk memastikan atau memberikan pendapat terkait rekomendasi yang diusulkan oleh auditor apakah sudah diimplementasikan oleh instansi. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat segera mungkin dilaksanakan. Dengan adanya tindak lanjut sesuai rekomendasi maka terdapat upaya perbaikan yang dapat menghindari kesalahan yang sama dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Method

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan melakukan studi literatur. Dalam proses penelitian ini, teori serta hubungan atau dampak antar variabel dianalisis melalui berbagai sumber seperti buku dan jurnal, yang dapat diakses baik secara fisik di perpustakaan maupun secara elektronik melalui Mendeley, Scholar Google, dan platform online lainnya.

Dalam konteks penelitian kualitatif, penggunaan studi literatur dilakukan secara konsisten sesuai dengan asumsi-asumsi metodologis. Pendekatan induktif digunakan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak membatasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif adalah untuk menyelidiki topik secara mendalam, seperti yang dinyatakan oleh Ali & Limakrisna (2013).

Results and Discussion

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar ini syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian oleh Rahmawati, dkk (2018), penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Tangerang Selatan. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur perlakuan akuntansi yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga selaras dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil riset Rasyid (2019) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil riset Ayuningsih, dkk (2022) penerapan Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malang.

Hasil-hasil penelitian tersebut konsisten mendukung hasil riset Ikyarti dan Aprila (2019) yang mendapatkan adanya pengaruh yang positif antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Aparatur negara yang mengerti dan memahami standar akuntansi diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik akan memberikan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik hal tersebut dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Semakin baik suatu instansi pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah maka secara otomatis laporan keuangan pemerintah yang disajikan akan berkualitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian Lestari dan Ardini (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern merupakan

suatu proses atau cara dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan mengukur sumber daya yang ditetapkan oleh pimpinan dan dilakukan secara terus menerus sehingga terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien serta keandalan pelaporan keuangan dan mencapai kualitas laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan penelitian Binawati dan Nindyaningsih (2022) membuktikan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen organisasi diantaranya dewan komisaris, manajemen dan bagian satuan kerja lainnya, yang dirancang dalam rangka mendapatkan suatu keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Hasil penelitian tersebut mendukung hasil riset Aldino dan Septiano (2021) yang menyatakan sistem pengendalian internal mempengaruhi secara paralel terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan baik dalam sebuah organisasi akan menciptakan kondisi lingkungan yang semangat dalam menghasilkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian Imtinan dan Hasibuan (2020) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat tercermin dari tingkat pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pengungkapan suatu laporan keuangan maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan sebaliknya apabila tingkat pengungkapan suatu laporan keuangan rendah maka kualitas laporan keuangan dinilai kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian Asyari, dkk (2022) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Tresnawati dan Apandi (2016) yang menyimpulkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tindak lanjut hasil rekomendasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode sebelumnya merupakan suatu upaya dalam memperbaiki temuan-temuan pemeriksaan berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh auditor, sehingga pada periode pemeriksaan selanjutnya temuan-temuan yang sama tidak berulang. Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode tahun lalu akan menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan risiko audit. Selain itu upaya kementerian/lembaga pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan teori, studi sebelumnya yang relevan, serta analisis dampak antar variabel, maka kerangka berpikir dapat dilihat dalam gambar berikut

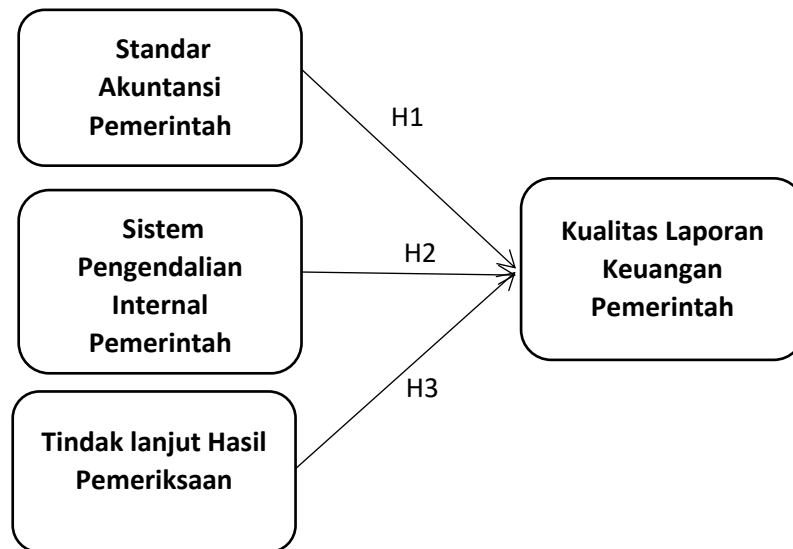


Figure 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Kompetensi sumber daya manusia: (Cris Kuntadi *et al.*, 2022), (Addinul Yaqin & Bambang Jatmiko, 2018), dan (Elvin Aldrianto & Diana Rahmawati, 2018)
- Pemanfaatan teknologi informasi: (Intan Novrika & Lilis Ardini., 2023), (Enita Binawati & Cyrenia Tri, 2022), (Febrianita Hadis *et al.*, 2022) dan (Purnama Sari *et al.*, 2022)
- Sistem informasi keuangan: (Siti Arifah *et al.*, 2020) dan (Septony B & Arthur S, 2020), dan (Helmi Prila & Renil Septiano, 2021)
- Auditor internal: (Frasca Ardy & Widhy Setyowati, 2019), (Erfiansyah & Kurnia, 2018), dan (Sri Rahayu, 2016)
- Komitmen organisasi: (Aziyah W & Yanto H, 2022), (Frasca Ardy & Widhy Setyowati, 2019), dan (Oktavia S & Rahayu S, 2019)
- Pelaksanaan anggaran: (Hernanda L & Setiyawati H, 2022)

Conclusion

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Acknowledgement

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, selain dari standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada instansi pemerintah maupun organisasi. Faktor lain tersebut antara lain kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi keuangan, auditor internal, komitmen organisasi, dan pelaksanaan anggaran.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah dan memperkaya sumber referensi dikarenakan artikel ini hanya berupa *literature review* dan tidak menguji melalui metode statistik. Selain itu, diperlukan variasi dalam pemilihan objek penelitian yang beragam guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

References

- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 1(1), 14-27.
- Asyari, M. H., Khoirunisa, I., Sunaryo, K., & Susilo, T. P. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 93-116.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2).
- Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(04).
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Dina Juniarti Barokah, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 134-144.
- Hermawan, A. R. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 304-315.
- Hery, 2016. *Analisis Laporan Keuangan- Integrated and Comprehensive Edition*. PT Grasindo.
- Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206-214.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215-224.

- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468.
- Kustiawan, M. (2016). Pengaruh pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345-362.
- Lestari, I. N., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9).
- Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Maydiyanti, S., & Putri, A. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal akuntansi dan ekonomika*, 10(1), 69-78.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1).
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55-62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pramana, A. C., Rukmini, M., Riningsih, D., Prihardina, O. W., & So, M. (2023). Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sebagai Penunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 49-56.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28
- Puspitaningrum, Y. P., & Efendi, D. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal ,SIA, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(1).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Rasyid, Y. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja

- Pemerintah Pusat di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1>, 97.
- Saefani Nur Hanifah, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 182-194.
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2018. *Akuntansi- Pengantar 1*. Edisi kesepuluh. UPP STIM YKPN
- Sularsih, H., & Wibisono, S. H. (2021). Literasi keuangan, teknologi sistem informasi, pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2028-2040.
- Tresnawati, F., & Apandi, R. N. N. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal Aset (akuntansi riset)*, 8(1), 13-24.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1-10.